



Operasional Pengendalian Operasi Armada dalam mendukung Implementasi PIT di Zona 3

Pertemuan LPP – WPPNRI 714 Tahun 2024

Kendari, 10 Desember 2024

Direktorat Pengendalian Operasi Armada – Ditjen PSDKP





KEBIJAKAN PENGAWASAN SDKP

KEBIJAKAN EKONOMI BIRU



1

**Perluasan
Kawasan
konservasi laut**

Meningkatkan perlindungan habitat penting untuk pemijahan ikan dan menjaga fungsi laut dalam menyerap CO₂ dan memproduksi O₂.



2

**Penangkapan
ikan terukur
berbasis kuota**

Menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan



3

**Pengembangan
budidaya laut,
pesisir, dan darat
secara
berkelanjutan**

Mengurangi tekanan sumber daya ikan di laut, memenuhi kebutuhan protein masyarakat dan pasar ekspor berbasis komoditas unggulan



4

**Pengawasan dan
pengendalian
pesisir dan
pulau-pulau
kecil**

Mengurangi tekanan/ dampak negatif kegiatan manusia, melestarikan dan menjaga kualitas ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil



5

**Pembersihan
sampah plastik
di laut**

Melalui gerakan partisipasi nelayan untuk menjaga laut agar tetap bersih sehingga ekosistem laut menjadi sehat



ISU STRATEGIS PSDKP



PERIKANAN



Illegal fishing



Transshipment illegal,
perbudakan,
perdagangan orang



Pemanfaatan ikan
dilindungi ilegal



Penyelundupan BBL



Impor dan
distribusi ikan
illegal



Budidaya ikan ilegal
dan mencemari



KELAUTAN



Pemanfaatan ruang
laut ilegal



Pencemaran perairan



Pemanfaatan
sedimentasi laut
ilegal



Destructive fishing



Perusakan ekosistem
perairan



Pemanfaatan Benda
Muatan Kapal
Tenggelam

Strategi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan





Ocean Big Data: Decision Support System

Kondisi Eksisting



Tingginya aktivitas di laut dan kawasan pesisir serta ancaman kerusakan laut



Operasional pengawasan belum bisa dilakukan secara *real-time* sehingga berpotensi terdapat celah pelanggaran



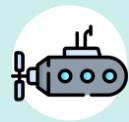
Database kelautan dan perikanan yang masih tersebar dan belum terintegrasi

Sumber KKP (2024)

Intervensi

Pembangunan Infrastruktur *Ocean Big Data* sebagai *Decision Support System*

Sistem Pengumpulan Data



Sensor laut



Drone udara dan laut



Kapal pengawas



Satelit nano



Stasiun bumi

Sistem Pengolahan Data



Artificial Inteligent



System Dynamic Modelling

Sistem Penyimpanan dan Akses Data



Dashboard Monitoring



Sistem Komunikasi *Broadband*

Manfaat



Peningkatan efektivitas pemantauan dan pengelolaan kawasan laut



Peningkatan efisiensi operasional dalam operasi maritim



Database sumber daya kelautan dan perikanan untuk identifikasi jenis ikan dan terumbu karang di perairan Indonesia



Desain Pengembangan Sistem Infrastruktur Ocean Big Data

Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance

CC KKP →



RADAR

Pemantauan dan pengawasan



Drone udara

LiDar (Light Detection and Ranging)

Kapal Pengawas



Ocean Big Data

Artificial Intelligence



Drone laut

Video dan sonar



Kapal Ikan



e-PIT



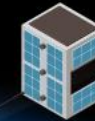
Sensor

pH, salinity, dissolved oxygen, water depth, insolation, turbidity, nutrient loads dan lainnya untuk mengukur kesehatan organisme laut



Satelit komunikasi

Broadband komunikasi



Satelit nano

- Scanning permukaan bumi
- VHF Data Exchange System (VDES)
- Deteksi Radio Frekuensi

Ocean Accounting

DSS

Decision Support System



Pemantauan dan perluasan kawasan untuk konservasi



Pengelolaan sumber daya kelautan (PIT)



Pemantauan sistem budidaya yang berkelanjutan



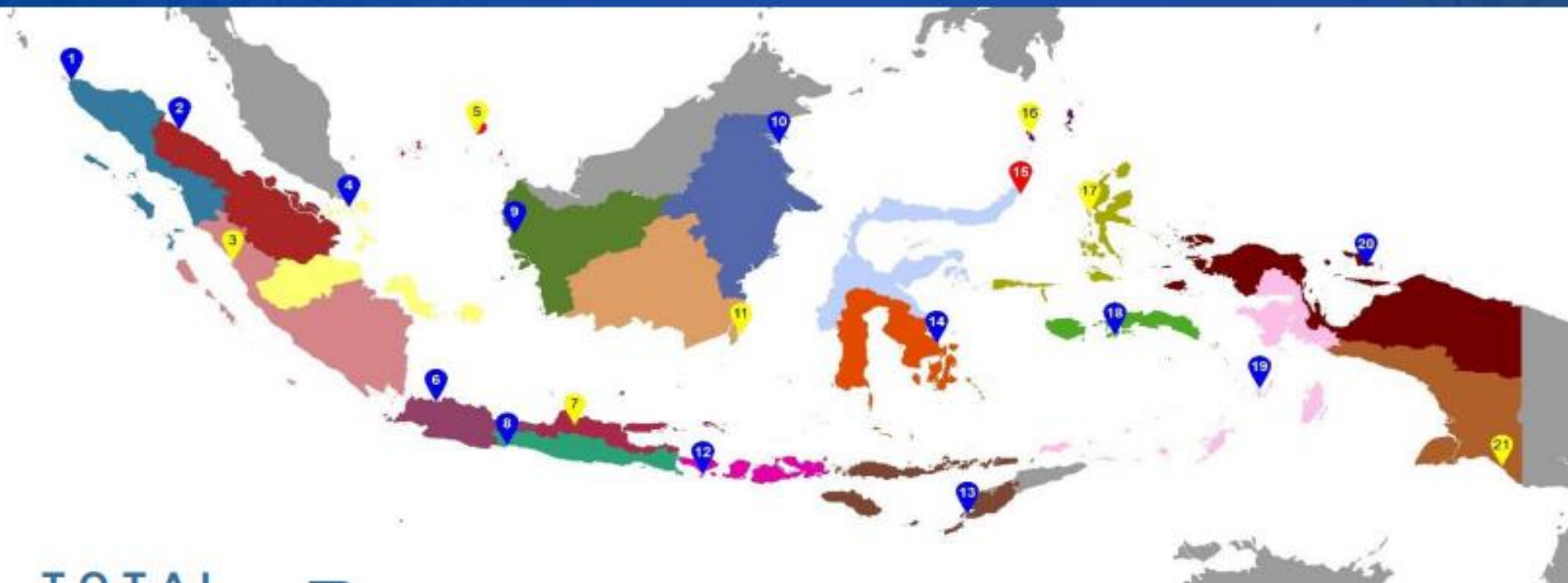
Pemantauan ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil (real-time data)



Database sumber daya KP untuk identifikasi jenis ikan dan terumbu karang di perairan Indonesia



USULAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN UPT PSDKP



- | | | | |
|-----------|--------------|--------------|-------------|
| 1. Aceh | 6 Jakarta | 11. Kotabaru | 17. Ternate |
| 2. Medan | 7. Pati | 12. Bali | 18. Ambon |
| 3. Padang | 8. Cilacap | 13. Kupang | 19. Tual |
| 4. Batam | 9. Pontianak | 14. Kendari | 20. Biak |
| 5. Natuna | 10. Tarakan | 15. Bitung | 21. Merauke |
| | | 16. Tahuna | |



LOKASI USULAN UPT PSDKP 21 UPT PSDKP

PEMBENTUKAN (7 UPT)

- 1 PANGKALAN PSDKP KENDARI
- 2 PANGKALAN PSDKP PRATAMA NATUNA
- 3 PANGKALAN PSDKP PRATAMA PADANG
- 4 PANGKALAN PSDKP PRATAMA PATI
- 5 PANGKALAN PSDKP PRATAMA TERNATE
- 6 PANGKALAN PSDKP PRATAMA KOTABARU
- 7 PANGKALAN PSDKP PRATAMA MERAUKE

PENGUBAHAN (9 UPT)

- 1 PANGKALAN PSDKP BATAM > PANGKALAN PSDKP UTAMA BATAM
- 2 PANGKALAN PSDKP BITUNG > PANGKALAN PSDKP UTAMA BITUNG
- 3 STASIUN PSDKP BELAWAN > PANGKALAN PSDKP MEDAN
- 4 STASIUN PSDKP CILACAP > PANGKALAN PSDKP CILACAP
- 5 STASIUN PSDKP PONTIANAK > PANGKALAN PSDKP PONTIANAK
- 6 STASIUN PSDKP TARAKAN > PANGKALAN PSDKP TARAKAN
- 7 STASIUN PSDKP KUPANG > PANGKALAN PSDKP KUPANG
- 8 STASIUN PSDKP AMBON > PANGKALAN PSDKP AMBON
- 9 STASIUN PSDKP BIAK > PANGKALAN PSDKP BIAK

TETAP (5 UPT)

- 1 PANGKALAN PSDKP LAMPULO > PANGKALAN PSDKP ACEH
- 2 PANGKALAN PSDKP JAKARTA
- 3 PANGKALAN PSDKP BENOA > PANGKALAN PSDKP BALI
- 4 PANGKALAN PSDKP TUAL
- 5 PANGKALAN PSDKP PRATAMA TAHUNA

NB*)

- PANGKALAN PSDKP UTAMA (Eselon II.b);
- PANGKALAN PSDKP (Eselon III.a)
- PANGKALAN PSDKP PRATAMA (Eselon IV.a)



Operasional Operasi Armada 2025



Pengawasan SDKP Modeling PIT Zona 3

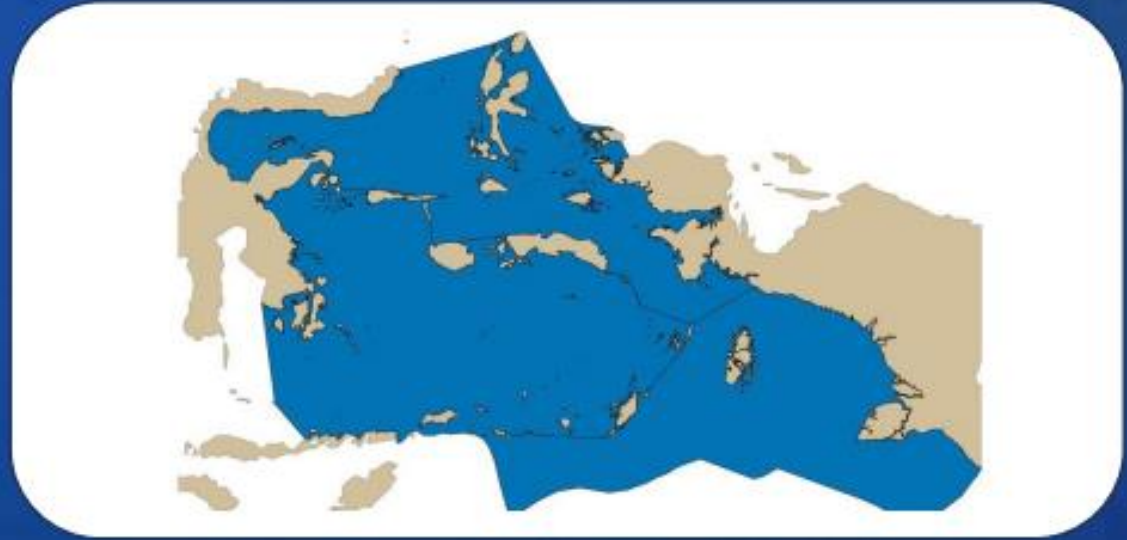
Inovasi & Penguatan Pengawasan SDKP di Lokasi
Modeling PIT Zona 3



**Zona 3
Monitoring Center**
Di Pangkalan PSDKP Tual



**Implementasi SOP
Bersama DJPT &
DJPSDKP**



Teknologi informasi terintegrasi:

- Vessel Traffic Center (VTC)
- Vessel Monitoring System (VMS)
- Automatic Identification System (AIS)
- War room kapal pengawas
- Sistem komunikasi

Fungsi dari Zona 3 Monitoring Center :

- melakukan pengawasan melalui analisis dan identifikasi resiko operasional kapal perikanan
- Memonitor kepatuhan kapal perikanan di Zona 3

Strategi pengawasan di Lokasi
Modeling PIT Zona 3



Before Fishing



while Fishing



During landing



Pos landing



**Pengawas
Perikanan :**
65 Orang



**Kelembagaan UPT
(3 Lokasi):**
Pangkalan PSDKP Bitung,
Pangkalan PSDKP Tual, Stasiun
PSDKP Ambon



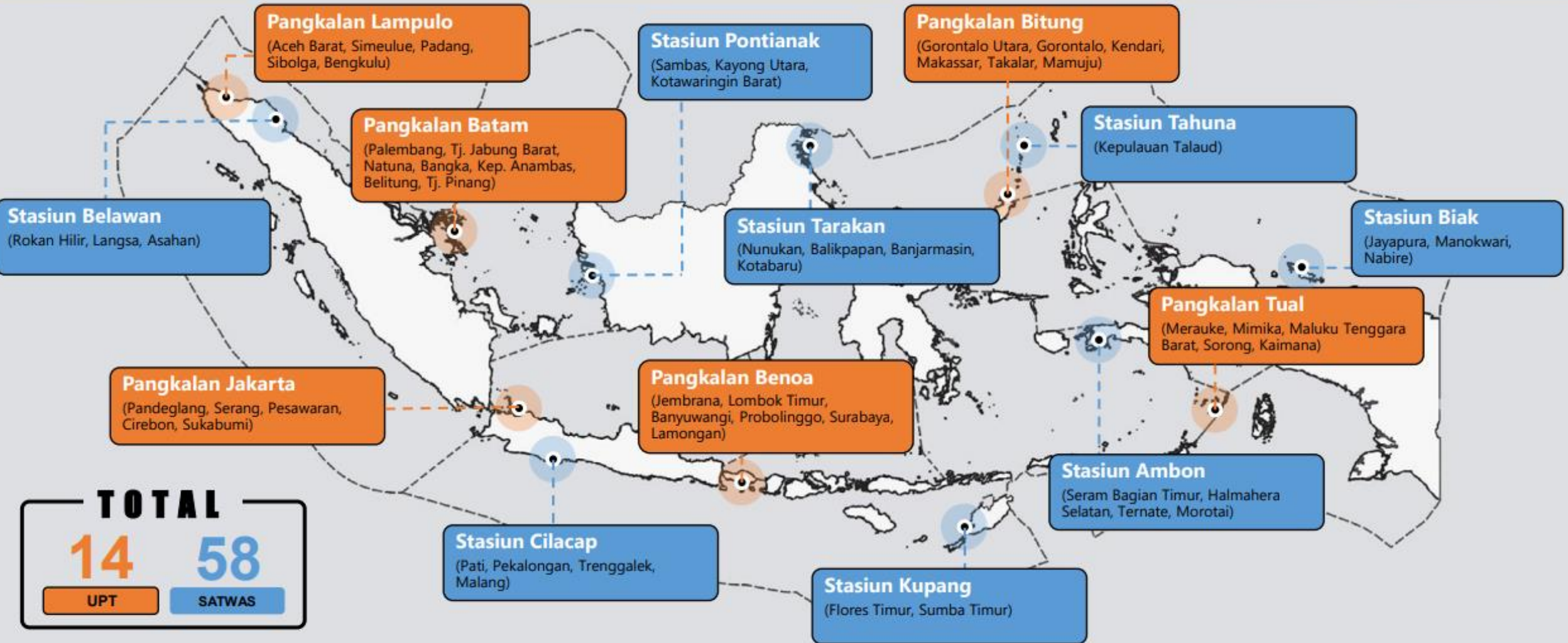
Pesawat Patroli
1 unit



Kapal pengawas (8)
Orca 1, Orca 5, Paus, Baracuda
2, Macan 6, Hiu 14, Hiu 05,
Hiu 13



SEBARAN UPT DAN SATWAS PSDKP



SARANA PRASARANA PENGAWASAN



Kapal Kelas I

KP Orca 01
KP Orca 02
KP Orca 03
KP Orca 04
KP Orca 05
KP Orca 06

Panjang : > 50 Meter



Kapal Kelas II

KP Hiu Macan Tutul 01
KP Hiu Macan Tutul 02
KP Paus 001
KP Barakuda 001
KP Barakuda 002

Panjang : 40-50 Meter



Kapal Kelas III

KP. Hiu 12
KP. Hiu 13
KP. Hiu 14
KP. Hiu 15
KP. Hiu 16
KP. Hiu 17
KP. Hiu Macan 001
KP. Hiu Macan 003
KP. Hiu Macan 004
KP. Hiu Macan 005
KP. Hiu Macan 006
KP. Hiu 11

Panjang : 30-40 Meter



Kapal Kelas IV

KP. Hiu 001
KP. Hiu 002
KP. Hiu 003
KP. Hiu 004
KP. Hiu 005
KP. Hiu 006
KP. Hiu 007
KP. Hiu 008
KP. Hiu 009
KP. Hiu 010

Panjang : 20-30 Meter



Kapal Kelas V

KP. Akar Bahar 001

Panjang : 15-20 Meter



SARANA PRASARANA PENGAWASAN

“Belum sepenuhnya Pangkalan PSDKP memiliki dermaga kapal pengawas”




2 unit Pesawat Patroli



91 unit Speedboat dan URC



34 unit Kapal Pengawas

	Kelas I KP Orca 01 KP Orca 04 KP Orca 02 KP Orca 05 KP Orca 03 KP Orca 06	6
	Kelas II KP Hiu Macan Tutul 01 KP Hiu Macan Tutul 02 KP Paus 001 KP Barakuda 01 KP Barakuda 02	5
	Kelas III KP Hiu Macan 001 KP Hiu 12 KP Hiu Macan 003 KP Hiu 13 KP Hiu Macan 004 KP Hiu 14 KP Hiu Macan 005 KP Hiu 15 KP Hiu Macan 006 KP Hiu 16 KP Hiu 11 KP Hiu 17	12
	Kelas IV KP Hiu 001 KP Hiu 006 KP Hiu 002 KP Hiu 007 KP Hiu 003 KP Hiu 008 KP Hiu 004 KP Hiu 009 KP Hiu 005 KP Hiu 010	10
	Kelas V KP Akar Bahar 001	1

PUSDAL dan RMC PSDKP





Pangkalan PSDKP Batam



Pangkalan PSDKP Lampulo



Perkembangan Pelanggaran dan Gakum di Laut Maluku dan Laut Banda (714 – 715) 2024 & **Deployment Asset Pengawasan 2025**



Operasi KP dalam Pengawasan PNBP Pasca Produksi

17 Kapal Pengawas

[KP Orca 01, KP Orca 03, KP Orca 05, KP Orca 06, KP BRC 01, KP BRC 02, KP HMT 02, KP HMC 03, KP HMC 04, KP HMC 05, KP Hiu 03, KP Hiu 04, KP Hiu 06, KP Hiu 07, KP Hiu 10, KP Hiu 12, KP Hiu 17]

Wilayah Operasi 4 ZONA PIT

Memeriksa 698 Kapal Perikanan

(688 Kapal Penangkap dan 10 Kapal Angkut)

Menangkap 38 Kapal

(24 Pasca Produksi, 1 Kapal Angkut, 10 Izin Daerah, 3 Tidak memiliki Dokumen)

Estimasi Volume Ikan dari Kapal yang diperiksa 8.232 Ton

Pengisian Logbook Kapal Perikanan yang diperiksa

Mengisi logbook : 136 Kapal (38%)
Tidak mengisi logbook : 435 Kapal (62%)

Dominan Pelanggaran :

Pelanggaran DPI, Izin daerah yang Belum Migrasi, **Alih Muat dari Kapal Pasca Produksi kepada Kapal Izin Daerah/ Kapal Angkut Bukan Mitra**

Periode : 12 Nov s.d 8 Des 2024



Data Henrikan Kapal Pengawas Tahun 2024 di L. Banda dan L. Maluku*

NO	NAMA KAPAL	GT	NAMA KAPAL PENANGKAP	ALKAP	PERAIRAN	DUGA LANGGAR	TINDAK LANJUT
1	KM. INKA MINA 920	32	HIU 02	Hand Line	WPPNRI 714 Laut Banda	Pelanggaran DPI	Adhock ke Satwas PSDKP Banggai
2	KM. TANPA NAMA	-	HIU BIRU 05	Bom Ikan	WPPNRI 714 Laut Banda	Bom Ikan	Adhock ke Pangkalan PSDKP Bitung
3	KM. NIRWANA	27	HIU 05	Purse Seine	WPPNRI 715 Laut Maluku	SIPI Expired	Adhock ke Pangkalan PSDKP Bitung
4	KM. SAGITARIUS RIK-RIF	28	ORCA 04	Hand Line Tuna	WPPNRI 715 Laut Maluku	Pelanggaran DPI Dokumen Perizinan Expired	Adhock ke Pangkalan PSDKP Bitung
5	KM. RAHMATULLAH	27	BARAKUDA 02	Hand Line	WPPNRI 715 Laut Maluku	Melanggar DPI	Adhock ke Pangkalan PSDKP Bitung
6	KM. TANPA NAMA	-	RUBBER BOAT MOROWALI	Bom Ikan	WPPNRI 714 Laut Banda	Bom Ikan	Adhock ke Pangkalan PSDKP Bitung
7	KM. TANPA NAMA	5	RUBBER BOAT BANGGAI	Pengangkut	WPPNRI 714 Laut Banda	Bom Ikan	Adhock ke Pangkalan PSDKP Bitung
8	KM. NELAYAN 2016-36	25	HIU 13	Pukat Cincin Pelagis Kecil	WPPNRI 714 Laut Banda	Tidak Memiliki Dokumen Perijinan	Adhock Ke Wilker SDKP Masohi
9	KM. KUDA LAUT 11	30	HIU 02	Pole and Line	WPPNRI 714 Laut Banda	Tidak memiliki SLO dan SPB Pelabuhan bongkar muat tidak sesuai dengan SIPI	Adhock ke Satwas PSDKP Kendari
10	KM. SAMPOERNA 02	29	HIU 02	Pole and Line	WPPNRI 714 Laut Banda	Melanggar DPI	Adhock ke Satwas PSDKP Kendari
11	KM. ANUGRAH PUTRA MANDIRI 01	29	HIU 02	Pukat Cincin Pelagis Kecil	WPPNRI 714 Laut Banda	Melanggar DPI	Adhock ke Satwas PSDKP Kendari
12	KM. PAMANS FISH	30	HIU 02	Pukat Cincin Pelagis Kecil	WPPNRI 714 Laut Banda	Melanggar DPI	Adhock ke Satwas PSDKP Kendari
13	KM. HOLLYWOOD - 70	23	ORCA 01	Hand Line Tuna	WPPNRI 715 Laut Maluku	Melanggar DPI	Adhock ke Pangkalan PSDKP Bitung
14	KM. ADRIEL 07	19	ORCA 01	Hand Line Tuna	WPPNRI 715 Laut Maluku	Melanggar DPI	Adhock ke Pangkalan PSDKP Bitung
15	KM. JUVITA INDAH	20	ORCA 01	Hand Line Tuna	WPPNRI 715 Laut Maluku	Melanggar DPI	Adhock ke Pangkalan PSDKP Bitung

***(28,3% dari jumlah pelanggaran yang berhasil ditindak di seluruh ZONA 3**



Deployment Asset Pengawasan SDKP di WPPNRI 714 Tahun 2025

- KP. Orca 05
- KP. Orca 06
- KP. Baracuda 02
- KP. Paus 01
- KP. Hiu 02
- KP. Hiu 05
- KP. Hiu 13
- Spread Boat/ RIB/ Sea Reader kendali Pangkalan PSDKP Bitung
- Pesawat Patroli Air Surveillance [35% coverage area pemantauan di Zona 3]

Terima Kasih

PSDKP 2024



Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia